

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat di daerah atau negara tersebut karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat.

Menurut Sukirno (2008), mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi meningkat dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu negara sangatlah penting guna mendukung pembangunan di sektor lainnya dalam rangka menunjang taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah sebuah proses peningkatan penghasilan total dan penghasilan perkapita suatu daerah dengan memperhitungkan segala perubahan yang ada termasuk perubahan infrastruktur sendiri yang berdampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dalam buku Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (Kementerian Tenaga Kerja RI, 2000) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menstimulasi dan mendorong adanya peningkatan investasi yang digunakan untuk mengurangi ketidakseimbangan yang terjadi dalam perencanaan, selain itu pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan sumber-sumber daya secara lebih efektif, termaksud penggunaan tenaga kerja yang selanjutnya akan meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Infrastruktur merupakan input yang penting bagi kegiatan produksi karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan infrastruktur memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya.

Kesadaran pentingnya Infrastruktur telah dimulai dari zaman Adam Smith pada tahun (1776), yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur menghasilkan eksternalitas positif, karena dapat meningkatkan produktivitas dari pelaku usaha dengan berkurangnya beban usaha yang harus ditanggung. Menurut hasil study Bank Dunia (1994), bahwa faktor utama yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi dunia abad ke-20 dibandingkan beberapa abad sebelumnya adalah karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan pembangunan Infrastruktur.

Dalam World Bank Report 1994, infrastruktur dibagi kedalam tiga golongan. Pertama, infrastruktur ekonomi yang merupakan aset fisik dalam menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi *Public Utilities* (telkomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *Public Works* (jalan, bendungan,

saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan, dan lapangan terbang). Kedua, Infrastruktur Sosial yang merupakan aset dalam mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi Pendidikan (sekolah dan perpustakaan), Kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan/puskesmas) serta untuk rekreasi (taman, museum dan lain-lain) Dan terakhir, Infrastruktur Administrasi/Institusi yang meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi, serta kebudayaan.

Pengelolaan infrastruktur ini sangat diperlu diperhatikan oleh pemerintah secara serius karena hal ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas infrastruktur (Sjafrizal, 2012).

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Dalam pemerintah saat ini, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu

negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, energi, pendidikan dan kesehatan. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam pemerintah saat ini infrastruktur ditempatkan pada prioritas nasional dalam proses pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya.

Pada tahun 2010 untuk Provinsi Jawa Barat di bagi menjadi 6 pengembangan wilayah yakni Metropolitan Bodebekpur (Bogor, Depok, Bekasi dan Cianjur) dan sekitarnya, Purwasuka (Purwakarta, Subang dan Karawang), Cekungan Bandung (Bandung, Bandung Barat, Cimahi), Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran), serta Sukabumi dan sekitarnya, pengembangan wilayah pembangunan ini di kriteria kan berdasarkan potensi, kegiatan produksi dan aglomerasi pusat pemukiman yakni untuk mencapai target penataan ruang dan pengembangan ekonomi per daerah masing-masing di Provinsi Jawa Barat .

Menurut Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heriyawan, “Yang menjadi prioritas dalam membangun infrastruktur yang ada di Jawa Barat adalah Infrastruktur Pendidikan dan Infrastruktur kesehatan serta dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia dan pada kemandirian perekonomian, baik pangan ataupun non pangan

Hal ini dilakukan agar senantiasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun sarana pendukung seperti Infrastruktur dan lain-lain yang mendukung pada Pembangunan Ekonomi yang menjadi prioritas di daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kondisi kriteria daerah masing-masing yang ada di Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran yang nyata dari dampak suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Laju pertumbuhan suatu daerah dapat di tunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto. Berikut ini adalah Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Jawa Barat menurut Pengembangan Wilayah pada tahun 2011-2016 :

Tabel 1.1 PDRB dasar harga konstan 2010 menurut Pengembangan Wilayah di Jawa Barat tahun 2016 (Miliar Rupiah)

No	Wilayah	2016
1	Metropolitan Bodebekjur	501,445
2	Cekungan Bandung	275,829
3	Purwasuka	205,913
4	Ciayumajakuning	131,461
5	Priangan Timur	89,566
6	Sukabumi dan sekitar	46,718
Total PDRB Jawa Barat (Miliar Rupiah)		1,250,932

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2017

Pada tabel 1.1. di jelaskan bahwa PDRB tertinggi di Jawa Barat menurut Pengembangan Wilayah pada tahun 2016 adalah wilayah MetropolitanBodebekpur dengan nilai PDRB sebesar 501.445 Triliun Rupiah dan PDRB terendah ditahun 2016

diduduki oleh wilayah Sukabumi dan sekitar dengan nilai PDRB nya sebesar 46.718 Triliun Rupiah. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Tmur yang dapat di tunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010

Selain dari kontribusi dari Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2010, Infrastruktur Jalan merupakan suatu penompang atau berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Karena dengan adanya infrastruktur jalan dapat mempermudah mobilitas barang maupun orang dari satu daerah ke daerah lain dari produksi rumah tangga maupun industri agar dapat memaksimalkan output yang dihasilkan.

Kontribusi di sektor Infrastruktur Jalan dapat dilihat pada tabel Panjang Jalan di Jawa Barat menurut Pengembangan Wilayah pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Panjang Jalan Menurut Pengembangan Kawasan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Km)

No	Wilayah	2016
1	Metropolitan Bodebekjur	6.620
2	Purwasuka	3.345
3	Priangan Timur	3.242
4	Ciayumajakuning	3.157
5	Cekungan Bandung	2.981
6	Sukabumi dan sekitar	1.370
	Total Panjang Jalan (Km)	20.715

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting, khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di wilayah Priangan Timur, dilihat dari data tersebut wilayah Priangan Timur berada pada peringkat ke tiga di Jawa Barat menurut Pengembangan Wilayah yang dilihat dari panjang jalan yang telah di bangun sebesar 3.242 Km.

Selain Infrastruktur Jalan, Listrik dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan produksi rumah tangga maupun industri agar dapat memaksimalkan output yang dihasilkan, Infrastruktur Listrik mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu perkembangan penggunaan Listrik dapat dilihat pada tabel berikut dengan Jumlah Rasio Elektrifikasi menurut Pengembangan Wilayah di Jawa Barat tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rasio Elektrifikasi Menurut Pengembangan Kawasan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (persen)

No	Wilayah	2016
1	Cekungan Bandung	98,7
2	Metropolitan Bodebekjur	98
3	Priangan Timur	96,9
4	Purwasuka	93,4
5	Sukabumi dan sekitar	93,4
6	Ciayumajakuning	91,6
	Total Rasio Elektrifikasi (%)	98

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat

Pada perkembangan presentase Rasio Elektrifikasi di Jawa Barat berdasarkan Pengembangan Wilayah, wilayah Priangan Timur pada tahun 2016 memiliki Rasio

Elektrifikasi sebesar 96,9% yang berarti masyarakat di wilayah Priangan Timur yang sudah menikmati listrik sudah 96,9%, sedangkan yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah wilayah Cekungan Bandung yang memiliki Rasio Elektrifikasi sebesar 98,7%, yang artinya masyarakat di wilayah Cekungan Bandung sendiri yang sudah menikmati Listrik sudah 98%.

Selain dari Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Sosial yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Infrastruktur Sosial adalah sarana prasarana umum yang terdiri dari kategori-kategori yang ada di dalam fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan atau fasilitas pendukung dalam Sosial yaitu meliputi kategori-kategori sebagai berikut:

1. Infrastruktur Pendidikan, berupa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas
2. Infrastruktur Kesehatan, berupa rumah sakit, rumah perawatan, , balai kesehatan (klinik), fasilitas pemeriksaan oleh dokter keliling, puskesmas , fasilitas perawatan gigi dengan mobil keliling, rumah yatim piatu, perawatan penderita gangguan emosi, perawatan pecandu alkohol dan obat bius, perawatan penderita cacat fisik dan mental, rumah buta dan tuli, serta mobil ambulans.

Tabel 1.4 Jumlah Infrastruktur Pendidikan Menurut Pengembangan Kawasan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

No	Wilayah	2016
1	Metropolitan Bodebekjur	4.934
2	Priangan Timur	4.563
3	Ciayumajakuning	3.731

4	Cekungan Bandung	3.486
5	Purwasuka	2.642
6	Sukabumi dan sekitar	1.530
Total Jumlah Sekolah (Unit)		20.886

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017

Pada Infrastruktur Pendidikan, di jelaskan bahwa data ini adalah data rekapitulasi antara Jumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang ada di Jawa Barat menurut Pengembangan Wilayah, jumlah Infrastruktur Pendidikan di Jawa Barat sebanyak 20.886 unit sedangkan bila menurut Pengembangan Wilayah, yang terbanyak ada pada wilayah Metropolitan Bodebepur sebanyak 4.934 unit sedangkan di wilayah Priangan Timur sebanyak 4.564 unit.

Oleh karena itu, pentingnya Infrastruktur Pendidikan diharapkan mampu membawa kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mutu modal sumber daya manusia sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien. Infrastruktur Pendidikan di Provinsi Jawa Barat menjadi tujuan utama dalam pembangunan di Jawa Barat agar terciptanya Sumber Daya Manusia yang tinggi pada masyarakat yang berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Selain infrastruktur pendidikan, Infrastruktur Kesehatan di harapkan menjadi salah satu indikator terciptanya factor pendorong pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari segi kesehatan masyarakat yang merupakan faktor input agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan

Untuk itu diperlukan ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas dan poliklinik/balai kesehatan untuk mendorong

peningkatan sumber daya manusia, kontribusi infrastruktur kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Infrastruktur Kesehatan Menurut Pengembangan Kawasan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Wilayah	2016
1	Metropolitan Bodebekjur	791
2	Cekungan Bandung	553
3	Purwasuka	483
4	Priangan Timur	437
5	Ciayumajakuning	374
6	Sukabumi dan sekitar	162
Total Fasilitas Kesehatan (unit)		2,800

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2017

Dalam data perbandingan ini adalah hasil rekapitulasi dari Jumlah Rumah Sakit, Poliklinik/Balai Kesehatan dan Puskesmas di Jawa Barat menurut Pengembangan Wilayah tahun 2016, dalam data ini di jelaskan bahwa jumlah Fasilitas Kesehatan terbanyak ada pada wilayah Metropolitan Bodebekpur dengan jumlah Fasilitas Kesehatan 791 unit, sedangkan wilayah Priangan Timur memiliki Fasilitas Kesehatan 437 unit.

Banyaknya Infrastruktur seperti adanya Infastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial sangat perlukan untuk mempermudah aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Wilayah yang memiliki prasarana yang memadai mampu menarik para investor untuk berinvestasi ke daerahnya dan mampu berkembang cepat dibandingkan dengan wilayah yang memiliki prasarana minim (Tri Wahyuni, 2009).

Dengan melihat data perbandingan diatas, dapat disimpulkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial yang ada di Priangan Timur masih tergolong rendah diantara pengembangan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Pertumbuhan Ekonomi di Priangan Timur masih tergolong rendah dengan pengembangan wilayah lainnya hal ini terjadi karena setiap daerah atau pengembangan wilayah khususnya di Provinsi Jawa Barat mempunyai kriteria atau perbedaan masing-masing dari segala aspeknya

Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang dilihat dari kuantitas dan kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial dan kondisi Pertumbuhan Ekonomi Priangan Timur yang dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan dalam perbandingan per pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Infrastruktur Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Priangan Timur Tahun 2011-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Wilayah kabupaten/kota pada dasarnya merupakan suatu tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk yang cukup tinggi, yang dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk. Daerah perkotaan terdapat berbagai kegiatan ekonomi seperti

industri, perdagangan, pertanian dan jasa. Wilayah Priangan Timur digunakan sebagai pusat jasa, perdagangan, pertanian, pariwisata serta pusat perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya menunjang aktivitas-aktivitas tersebut maka diperlukannya infrastruktur yang memadai sehingga lebih memudahkan para pelaku ekonomi dalam berinteraksi.

Dalam penelitian ini yang akan dikaji Infrastruktur Ekonomi yang terdiri dari *public utilities* dan *public work*, untuk *public utilities* yang terdiri dari variabel Infrastruktur Listrik, sedangkan *public works* terdiri dari variable infrastruktur jalan dan infrasturktur sosial meliputi infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Sehingga rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Panjang Jalan, Listrik, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Priangan Timur?
2. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Priangan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Priangan Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat akademik dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya terkait dengan pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.